

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS DESKRIPTIF

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis

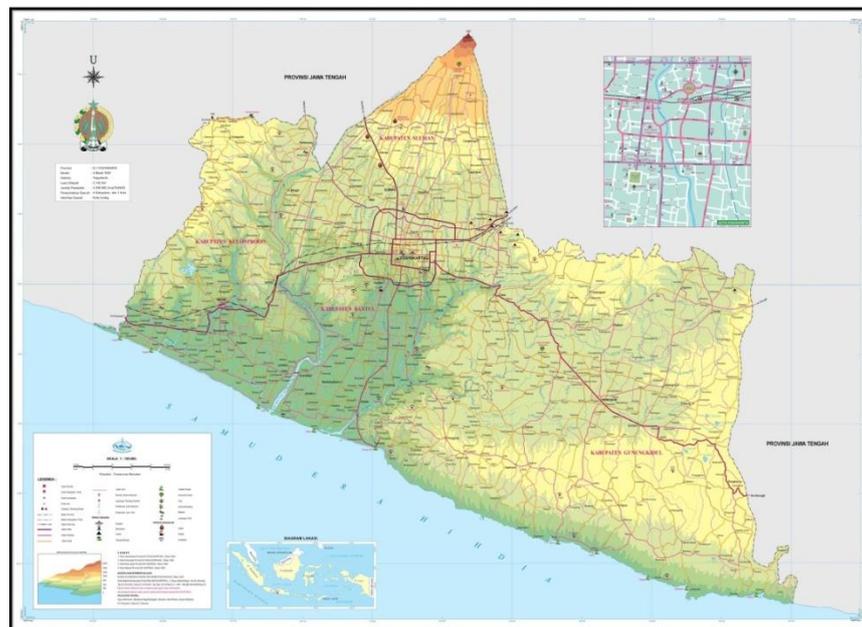
Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa. Batas-batas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

- a. Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Klaten
- b. Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo
- d. Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Magelang

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara administratif, terdiri dari 1 kota, 4 kabupaten, 78 kecamatan, dan 438 kelurahan/desa. Wilayah administratif adalah :

- a. Kota Yogyakarta (luas 32,50 km², 14 kecamatan, dan 45 kelurahan);
- b. Kabupaten Bantul (luas 506,85 km², 17 kecamatan, dan 75 desa);
- c. Kabupaten Kulon Progo (luas 586,27 km², 12 kecamatan, dan 88 desa);
- d. Kabupaten Gunungkidul (luas 1.485,36 km², 18 kecamatan, dan 144 desa);
- e. Kabupaten Sleman (luas 574,82 km², 17 kecamatan, dan 86 desa).

Berikut tampilan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk peta :



Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut *altitude*, terbagi menjadi daerah dengan ketinggian <100 meter, 100-500 meter, 500–1.000 meter (sebagian besar di Kabupaten Bantul), dan 1.000–2000 meter diatas permukaan laut terletak di Kabupaten Sleman. Sementara itu, secara fisiografi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi 4 satuan wilayah:

- a. Satuan fisiografi gunung api merapi, mulai dari kerucut gunung hingga bentang lahan vulkanik, meliputi Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Bantul. Daerah kerucut dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan.

Wilayah ini memiliki luas kurang lebih 582,81 km² dengan ketinggian 80–2.911 meter.

- b. Satuan fisiografi pegunungan seribu gunungkidul, merupakan kawasan perbukitan batu gamping dan bentang karst tandus dan kurang air permukaan, di bagian tengah merupakan cekungan Wonosari yang terbentuk menjadi Plato Wonosari. Wilayah pegunungan ini memiliki luas kurang lebih 1.656,25 km² dengan ketinggian 150-700 meter.
- c. Satuan fisiografi pegunungan di Kulon Progo bagian utara, merupakan bentang lahan struktural *denudasional* dengan topografi berbukit, kemiringan lereng curam dan potensi air tanah kecil. Luas wilayah ini mencapai kurang lebih 706,25 km² dengan ketinggian 0-572 meter.
- d. Satuan fisiografi dataran rendah, merupakan bentang lahan *fluvial* (hasil proses pengendapan sungai) yang didominasi oleh dataran *aluvial*, membentang mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Wilayah ini memiliki luas 215,62 km² dengan ketinggian 0–80 meter.

Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan sarana prasarana, sosial, ekonomi, serta ketimpangan kemajuan pembangunan. Daerah-daerah yang relatif datar, (dataran *aluvial* meliputi Sleman, Kota, dan Bantul) adalah wilayah padat penduduk, memiliki intensitas sosial ekonomi tinggi, maju, dan berkembang. Namun, di daerah ini banyak terjadi pencemaran lingkungan.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki iklim tropis dengan curah hujan berkisar 38-409 mm dengan hari hujan per bulan antara 0-28 kali. Suhu udara rata-rata berkisar 27,210C. Kelembaban udara berkisar antara 53,42-98,33 persen dan tekanan udara 1.009,58–1.018,25 mb dengan arah angin antara 60-240 derajat dan kecepatan angin antara 0-26 knot (BPS, 2013).

Curah hujan tertinggi pada tahun 2010 tercatat 512,3 mm dengan hari hujan per bulan sebanyak 25 kali. Kondisi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009. Kecepatan angin maksimum pada tahun 2010 mencapai 47 knot, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 (43 knot) (Profil Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013).

2. Keadaan Demografi

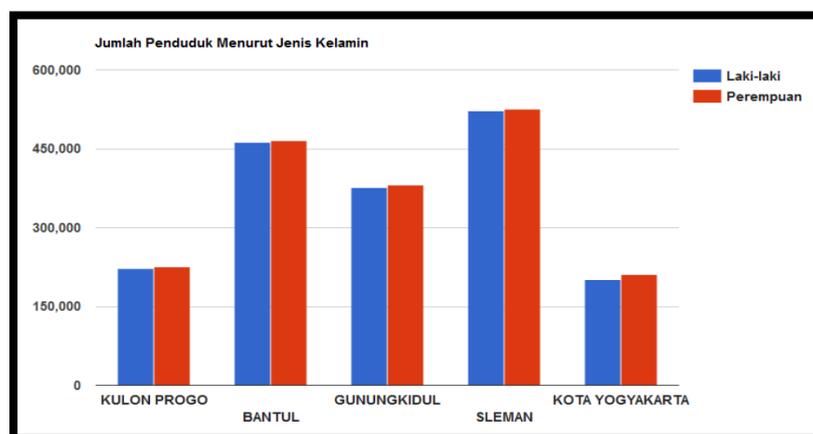
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki penduduk sebesar 3.587.921 jiwa pada tahun 2017 (Biro Tata Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), sedangkan menurut proyeksi BPS jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 sebesar 3.762.167 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.220 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 13.413 jiwa per kilometer persegi dan kepadatan terendah di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 504 per kilometer persegi.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah
Kulon Progo	446.028
Bantul	927.181
Gunungkidul	757.169
Sleman	1.046.642
Yogyakarta	410.921
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	3.587.921

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017

Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta relatif seimbang. Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki adalah 49,65%. Sementara itu, penduduk perempuan adalah 50,35%. Perbandingan yang relatif seimbang ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.



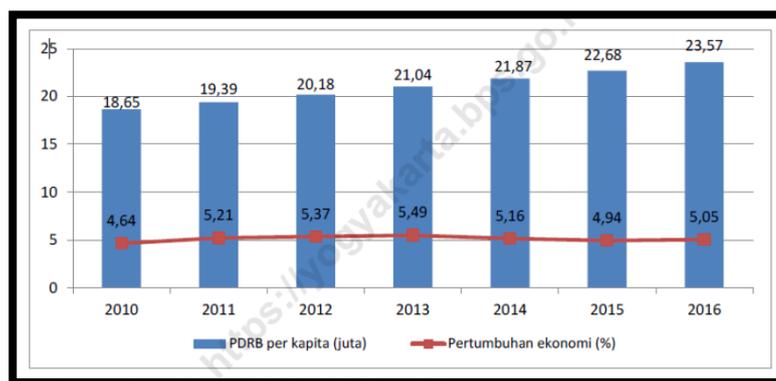
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Program Prioritas Nasional adalah Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan ini sesuai juga dengan komitmen pertama dalam MDG's

adalah penanggulangan kemiskinan dan kelaparan. Hal ini menyiratkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang mendesak untuk segera ditanggulangi. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 tahun terakhir yaitu : pada tahun 2014 sebesar 5,58, tahun 2015 sebesar 4,95 dan tahun 2016 sebesar 5,05.



Gambar 4.3 Grafik PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2016

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017

Indikator kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara berturut-turut mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai 2017. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 14,91%, tahun 2016 sebesar 13,34%, dan tahun 2017 sebesar 13,02%. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sebesar 488.530 jiwa.

Persoalan kemiskinan tidak sekedar mencakup urusan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga menyangkut aspek kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Menurut Bappeda Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam Analisis Informasi Statistik Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 bahwa berdasarkan series data selama periode 2007 – 2016 terdapat kecenderungan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penurunan ini menjadi sinyal yang positif bagi pengentasan kemiskinan. Namun demikian nilai indeks tercatat meningkat beberapa kali pada bulan Maret 2009, Maret 2012 dan Maret 2015. Penyebab kenaikan kedua indeks adalah pertumbuhan garis kemiskinan yang lebih besar dari pertumbuhan pengeluaran kelompok penduduk miskin.

a. Tingkat Pendidikan

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian indikator bidang pendidikan seperti ketersediaan sarana dan infra struktur pendidikan, angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf yang semakin meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai institusi pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Jumlah TK 2135 sekolah, SD/MI 2009 sekolah, SMP/MTS 530 sekolah, SMU/MA 204 sekolah dan SMK 220 sekolah. sehingga total jumlah sekolah tercatat 5.098 unit. Sementara itu, jenjang Perguruan

Tinggi (PT) pada tahun 2015/2016 17 universitas, 5 institut, 36 sekolah tinggi, 41 akademi dan 7 poli teknik.

Produksi tenaga kesehatan oleh sarana pendidikan cukup tinggi namun daya serapnya masih rendah. Institusi pendidikan kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami perkembangan. Sejak tahun 2009, tercatat jumlah institusi penyelenggara pendidikan kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 51 institusi yang terdiri dari jenjang D3 dan S1. Perincian untuk jenjang D3 adalah sebagai berikut : (1) D3 keperawatan sebanyak 11 institusi, (2) D3 Gizi 3 institusi, (3) D3 Analis 2 institusi, (4) D3 Lingkungan 2 institusi, (5) D3 Kebidanan 7 institusi, dan (6) D3 Farmasi 1 institusi. Sementara itu, untuk jenjang S1 perinciannya adalah sebagai berikut : (1) Fakultas Kedokteran 4 institusi, (2) Fakultas Kedokteran Gigi 1 institusi, (3) Farmasi 4 institusi, (4) Kesehatan Masyarakat 4 institusi, (5) Keperawatan 8 institusi, dan (6) Gizi 1 institusi.

Pola manajemen pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan telah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah. Meskipun begitu, koordinasi peningkatan kualitas tenaga dengan lembaga pendidikan masih kurang. Sementara itu, peran swasta cenderung kurang terkendali karena kegunaan dan mutu belum sesuai kebutuhan dan kemampuan penyerapan yang diakibatkan terbatasnya dana dalam rekrutmen dan pemeliharaan tenaga, profesionalisme, kompetensi dan

etika SDM kesehatan, serta berkaitan dengan proses produksi (pendidikan dan training).

b. Pekerjaan

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktifitas perekonomian. Semakin baik kualitas tenaga kerja yang dimiliki suatu wilayah, maka produktifitas pekerjanya juga semakin meningkat. Konsep ketenagakerjaan di Indonesia merujuk pada rekomendasi ILO yang membagi penduduk berusia produktif berdasarkan aktifitasnya. Pembagian ini mencakup penduduk berdasarkan aktifitasnya ini menjadi dua yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang berusia kerja yang berstatus sedang bekerja dan pengangguran. Bukan angkatan kerja mencakup mereka yang aktifitasnya bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Total penduduk usia kerja Indonesia pada Agustus 2017 diperkirakan sebanyak 2.960.204 orang, bertambah 21.201 orang (0,72 persen) dibandingkan keadaan enam bulan sebelumnya (2.939.003 orang) dan bertambah 42.552 orang (1,46 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu (2.917.652 orang). Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2017 mencapai 2.117.187 orang, bertambah 1.218 orang (0,06 persen) dibandingkan angkatan kerja Februari 2017 sebesar 2.115.969 orang dan bertambah 17.751 juta orang (0,85 persen) dibandingkan angkatan kerja Agustus 2016 sebesar 2.099.436

orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 sebesar 2.053.168 orang, berkurang sekitar 2.724 orang (0,13 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2017 (2.055.892 orang), dan bertambah 10.768 orang (0,53 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 (2.042.400 orang).

Jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2017 mencapai 64.019 orang, bertambah 3.942 orang jika dibandingkan keadaan Februari 2017 (60.077 orang), dan bertambah 6.983 orang (0,34 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 (57.036 orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2017 mencapai 3,02 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen poin dibanding TPT Februari 2017 (2,84 persen) dan mengalami kenaikan sebesar 0,30 persen poin dibanding TPT Agustus 2016 (2,72 persen).

Pada Agustus 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta, yaitu 5,08 persen, sedangkan TPT terendah terjadi di Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,65 persen. Sektor 3 (Perdagangan besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel) masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan menyerap 553.726 orang (26,97 persen) pekerja, sementara sektor 5 (Pertambangan, Penggalian, Listrik, Gas, Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan

Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan) paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu menyerap 324.862 orang (15,82 persen) pekerja.

Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), bahwa jumlah penduduk berusia kerja meningkat dari 2,8 juta jiwa pada bulan Februari 2013 menjadi 2,9 juta jiwa pada Februari 2016. Komposisi angkatan kerja terhadap penduduk berusia kerja berfluktuasi pada level 68 – 73 %, sementara komposisi pada penduduk berusia kerja fluktuasinya antara 27 – 32 %. Pada Februari 2016 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat 2,1 juta jiwa atau sebesar 72,2 %. Perkembangan TPAK di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa laki-laki memiliki level yang lebih tinggi dibanding perempuan dengan TPAK laki-laki berfluktuasi antara 77 – 84 % dan perempuan antara 57 – 67 %. Fenomena ini mengindikasikan keterlibatan laki-laki dalam aktifitas perekonomian cenderung lebih dominan dibanding perempuan. Hal ini kemungkinan faktor pengaruh budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keterbatasan lapangan kerja menyebabkan tidak semua angkatan kerja yang tersedia dapat terserap di pasar kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat jumlah pencari kerja pada tahun 2012 sebanyak 87.541 orang, meningkat sekitar 0,94% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 86.726 orang. Mereka terdiri dari 52,13% laki-laki dan 47,87% perempuan. Dari jumlah

tersebut sebesar 2,74% berpendidikan SD, 5,03% berpendidikan SLTP, 34,32% berpendidikan SLTA, 13,06% berpendidikan D1-D3, 43,40% berpendidikan D4-S1, serta 1,45% berpendidikan S2-S3. Sementara itu, persentase lowongan pekerjaan yang tersedia dalam penempatan masing-masing adalah 18,06% dan 13,82% dari total pencari kerja.

Perkembangan TPAK menurut wilayah menunjukkan TPAK daerah pedesaan tercatat selalu lebih tinggi dari perkotaan. TPAK pedesaan berfluktuasi antara 71 – 81 %, sedangkan perkotaan pada angka 66 – 72 %. Hal ini terkait dengan kecenderungan penduduk perkotaan terutama yang berusia muda yang lebih memilih menyelesaikan sekolah sampai tuntas sebelum masuk pada pasar tenaga kerja.

Berdasarkan Kabupaten/kota, TPAK tertinggi tercatat di kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Sementara TPAK terendah di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Rendahnya TPAK di Sleman dan Kota Yogyakarta disebabkan oleh tingginya proporsi penduduk usia kerja yang statusnya masih bersekolah.

B. Deskriptif Data Panel

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2012-2017

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara. Negara yang

mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah negara yang mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan melihat perubahan relatif dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah pada periode waktu tertentu. PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 dapat diketahui pada table berikut.

Tabel. 4.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tahun 2012-2017

No	Kabupaten	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kulonprogo	4.196.448	5.741.660	6.004.316	6.281.896	6.580.777	6.973.626
2	Bantul	11.242.151	14.138.719	14.851.124	15.588.520	16.376.784	17.217.794
3	Gunung Kidul	7.962.605	10.177.433	10.639.792	11.152.363	11.697.447	12.282.494
4	Sleman	16.696.582	25.367.414	26.713.071	28.098.007	29.573.995	31.155.676
5	Kota Yogyakarta	14.327.563	20.239.558	21.307.764	22.393.012	23.538.102	24.771.530

Sumber data primer tahun 2019

No	Kabupaten	Tahun 2012-2017			
		Mean	Sd	Min	Max
1	Kulonprogo	5.963.121	967.069	4.196.448	6.973.626
2	Bantul	14.902.515	2.097.087	11.242.151	17.217.794
3	Gunung Kidul	10.652.022	1.513.938	7.962.605	12.282.494
4	Sleman	26.267.457	5.114.471	16.696.582	31.155.676
5	Kota Yogyakarta	21.096.255	3.680.916	14.327.563	24.771.530

Lanjutan tabel 2

Tabel di atas menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 berdasarkan Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari 5 kabupaten memiliki rata-rata berbeda nilai rata-rata tertinggi di kabupaten sleman dan terendah di kabupaten kulon progo. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih sedikit berada di bawah rata-ratanya.

Pertumbuhan ekonomi di samping berdampak pada peningkatan pendapatan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang ada, akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah, sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

2. **Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2012-2017**

Pembangunan manusia dimaknai sebagai proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan salah satu indikator komposit untuk mengukur capaian atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas kehidupan manusia (masyarakat/ penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 dapat diketahui pada table berikut.

Tabel 4.3. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2012-2017

No	Kabupaten	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kulonprogo	75,33	75,95	70,68	71,52	72,38	73,23
2	Bantul	75,51	76,01	77,11	77,99	78,42	78,67
3	Gunung Kidul	71,11	71,64	67,03	67,41	67,82	68,73
4	Sleman	79,39	79,97	80,73	81,2	82,15	82,85
5	Kota Yogyakarta	80,24	80,51	83,78	84,56	85,32	85,49

Sumber data primer tahun 2019

No	Kabupaten	Tahun 2012-2017			
		Mean	Sd	Min	Max
1	Kulonprogo	73	2,09492	71	76
2	Bantul	77	1,30463	76	79
3	Gunung Kidul	69	1,96391	67	72
4	Sleman	81	1,30360	79	83
5	Kota Yogyakarta	83	2,35968	80	85

Lanjutan tabel 3

Tabel di atas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 berdasarkan Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari 5 kabupaten memiliki rata-rata berbeda nilai rata-rata tertinggi sebesar 83 di kota Yogyakarta dan terendah sebesar 69 di kabupaten Gunung Kidul. IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Capaian UHH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tinggi maupun peningkatannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan kesehatan dasar yang murah, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk;

peningkatan usia perkawinan pertama bagi wanita; peningkatan pendidikan wanita usia subur; peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tata cara perawatan selama kehamilan; penanganan proses persalinan, dan pasca kelahiran. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap berkurangnya kasus kejadian kematian bayi dan balita di seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam beberapa dekade terakhir dan berimbas pada kenaikan usia harapan hidup.

Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Tingginya capaian dan peningkatan harapan lama sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta penduduk didorong oleh meningkatnya angka partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan tingkat menengah dan tinggi yang cukup representatif, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk serta level kesejahteraan penduduk yang semakin meningkat

Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Tingginya level pengeluaran

riil per kapita ini dipengaruhi oleh pola konsumsi penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih bervariasi serta tingkat harga komoditas barang dan jasa yang secara relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat harga komoditas yang sama di provinsi lain. Dengan kata lain, daya beli penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi dari provinsi lainnya.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012-2017

Pengangguran Terbuka adalah Angkatan kerja yang tidak bekerja/ tidak mempunyai pekerjaan, yang mencakup angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 dapat diketahui pada table berikut.

Tabel 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012-2017

No	Kabupaten	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kulonprogo	3,04	2,85	2,88	3,72	2,86	1,99
2	Bantul	3,70	3,36	2,57	3,00	3,06	3,12
3	Gunung Kidul	1,38	1,69	1,61	2,90	2,28	1,65
4	Sleman	5,64	3,28	4,21	5,37	4,44	3,51
5	Kota Yogyakarta	5,33	6,54	6,45	5,52	5,30	5,08

Sumber: data primer tahun 2019

No	Kabupaten	Tahun 2012-2017			
		Mean	Sd	Min	Max
1	Kulonprogo	2,89	0,55	1,99	3,72
2	Bantul	3,14	0,38	2,57	3,70
3	Gunung Kidul	1,92	0,57	1,38	2,90
4	Sleman	4,41	0,96	3,28	5,64

5	Kota Yogyakarta	5,70	0,63	5,08	6,54
---	-----------------	------	------	------	------

Lanjutan tabel 4

Tabel tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 berdasarkan Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari 5 kabupaten memiliki rata-rata berbeda, nilai rata-rata tertinggi sebesar 6,45 di kota Yogyakarta dan terendah sebesar 2,9 di kabupaten Gunung Kidul. Hal ini terjadi karena diwilayah perkotaan memiliki sektor formal yang lebih banyak dibandingkan wilayah pedesaan, seperti diketahui bahwa sektor formal lebih sulit dimasuki oleh para angkatan kerja untuk bekerja karena lebih banyak menggunakan keahlian atau syarat-syarat tertentu dibandingkan sektor informal. Selain itu disebabkan juga penduduk pedesaan biasanya tidak terlalu selektif memilih lapangan pekerjaan, sehingga akan melakukan kegiatan apa saja walau hanya sebagai pekerja keluarga, pekerja bebas pertanian dan sebagian masih bertahan di pedesaan dengan berusaha mencari pekerjaan dengan cara melaju (nglajo/commute/pulang-pergi/ulang-alik) ke perkotaan, apalagi dengan kemudahan kepemilikan kendaraan bermotor dan semakin baiknya kondisi infrastruktur seperti fasilitas jalan raya.

4. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 dapat diketahui pada table berikut.

Tabel. 4.5 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017

No	Kabupaten	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kulonprogo	92,40	86,50	84,70	88,10	84,34	84,15
2	Bantul	158,80	156,60	153,50	160,20	142,76	139,59
3	Gunung Kidul	156,50	152,40	148,40	155,00	139,15	135,70
4	Sleman	116,80	110,80	110,40	111,00	96,63	96,73
5	Kota Yogyakarta	37,60	35,60	35,60	36,00	32,06	32,18

Sumber: data primer tahun 2019

No	Kabupaten	Tahun 2012-2017			
		Mean	Sd	Min	Max
1	Kulonprogo	87	3.18	84	92
2	Bantul	152	8.67439	140	160
3	Gunung Kidul	148	8.60537	136	157
4	Sleman	107	8.37888	97	117
5	Kota Yogyakarta	35	2.23259	32	38

Lanjutan tabel 6

Tabel di atas menunjukkan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 berdasarkan Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari 5 kabupaten memiliki rata-rata berbeda. Nilai rata-rata tertinggi sebesar 152 di Kabupaten Bantul dan terendah sebesar 35 di Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan, selama rentang waktu 2013-2017, garis kemiskinan makanan masih mendominasi dalam pembentukan garis kemiskinan baik diperdesaan maupun di perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian, terlihat adanya pola yang sedikit berbeda antara garis kemiskinan makanan di perkotaan dan di perdesaan. Selama periode 2013 – 2017, kontribusi garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan total menunjukkan

kecenderungan yang meningkat di daerah perkotaan. Sebaliknya, pada periode yang sama, garis kemiskinan justru menunjukkan kontribusi yang semakin berkurang terhadap pembentukan garis kemiskinan total di daerah perdesaan.